

Analisis Penentuan Produk Unggulan Daerah (PUD) Sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Daerah

Adelia Rizki Alfitri¹, Ertien Rining Nawangsari²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: 22041010039@student.upnjatim.ac.id¹, ertin_rining.adneg@upnjatim.ac.id²

Article History:

Received: 27 April 2025

Revised: 05 Mei 2025

Accepted: 12 Mei 2025

Keywords: Produk Unggulan Daerah (PUD), Ekonomi Lokal, Potensi Daerah

Abstract: Penentuan Produk Unggulan Daerah (PUD) merupakan langkah strategis yang penting dalam pengembangan ekonomi lokal, terutama di Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan PUD dan bagaimana PUD dapat meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis literatur, yang mencakup studi pustaka dan analisis dokumen terkait PUD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sub-sektor industri makanan, perdagangan besar, dan penyediaan akomodasi memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan PUD meliputi potensi sumber daya alam, kapasitas produksi, dukungan kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan PUD tidak hanya bergantung pada potensi sumber daya alam, tetapi juga pada kebijakan yang mendukung dan keterlibatan masyarakat. Rekomendasi praktis mencakup perlunya pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, meningkatkan infrastruktur, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan PUD. Temuan ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam merumuskan strategi pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.

PENDAHULUAN

Perekonomian lokal memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Di Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau dengan keragaman budaya, sumber daya alam, dan struktur masyarakat, pengembangan ekonomi lokal sering kali menjadi kunci untuk memacu Perekonomian lokal memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Di Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau dengan keragaman budaya, sumber daya alam, dan struktur masyarakat, pengembangan ekonomi lokal sering kali menjadi kunci untuk memacu kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah (Budiyanto, 2023). Namun, tidak semua

daerah mampu memanfaatkan potensinya secara maksimal. Berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya akses terhadap teknologi, dan kurangnya dukungan kebijakan yang relevan, menghambat upaya ini.

Ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa, menjadi isu yang terus diperhatikan. Daerah-daerah tersebut sering kali menghadapi kesenjangan signifikan dalam hal akses terhadap sumber daya, teknologi, dan investasi. Dalam konteks ini, penentuan Produk Unggulan Daerah (PUD) menjadi strategi penting untuk mengatasi ketimpangan dan mendorong daya saing ekonomi. PUD tidak hanya membantu mendorong perekonomian lokal tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat struktur ekonomi wilayah.

Signifikansi penelitian ini terletak pada pentingnya penentuan Produk Unggulan Daerah (PUD) sebagai strategi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. PUD tidak hanya membantu mendorong perekonomian lokal tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat struktur ekonomi wilayah. Dengan memahami dan mengembangkan PUD, daerah dapat lebih kompetitif di pasar regional maupun global, sekaligus mempertahankan keberlanjutan sumber daya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penentuan PUD dapat menjadi strategi yang efektif dalam pengembangan ekonomi lokal. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: 1) Apa saja faktor yang mempengaruhi penentuan PUD? 2) Bagaimana PUD dapat meningkatkan daya saing ekonomi lokal?. Strategi penentuan PUD berakar pada pemahaman mendalam tentang kekuatan dan keunikan daerah tertentu. Produk unggulan tidak hanya dilihat sebagai hasil ekonomi, tetapi juga sebagai representasi identitas lokal yang mencerminkan budaya, tradisi, dan sumber daya alam. Oleh karena itu, pengembangan PUD memiliki dimensi strategis yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Peningkatan daya saing melalui PUD dapat membantu daerah menjadi lebih kompetitif di pasar regional maupun global, sekaligus mempertahankan keberlanjutan sumber daya.

Implementasi strategi ini tidaklah sederhana. Berbagai tantangan sering muncul, seperti kurangnya data yang akurat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, serta kesenjangan dalam kapasitas pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sistematis dan berbasis riset untuk memastikan bahwa proses penentuan PUD mencerminkan kebutuhan dan potensi daerah. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat lokal, menjadi sangat penting dalam memastikan keberhasilan strategi ini (Kim dan Park, 2019).

LANDASAN TEORI

Teori Analisis Kebijakan

Mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, analisis kebijakan adalah proses yang sangat penting dalam menentukan arah dan strategi pembangunan. Salah satu tokoh penting dalam analisis kebijakan adalah William Dunn, yang memberikan kontribusi besar melalui pendekatannya yang sistematis dalam menganalisis kebijakan publik (Dunn, 2014). Dalam bukunya *Public Policy Analysis*, Dunn mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah disiplin yang mengkaji berbagai alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang mungkin terjadi. Dunn menekankan pentingnya analisis yang berbasis pada informasi yang akurat dan teknik yang tepat untuk mengevaluasi kebijakan.

Dunn mengusulkan beberapa tahapan dalam analisis kebijakan, yang mencakup identifikasi masalah, penentuan tujuan kebijakan, penilaian alternatif kebijakan, evaluasi konsekuensi,

pemilihan kebijakan, serta implementasi dan evaluasi. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan sistematis yang dilakukan oleh analis kebijakan untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterima oleh pembuat kebijakan (Pratiwi, 2024).

Beranjak dari tahapan yang dijabarkan oleh Dunn, dapat diketahui lebih lanjut bahwasannya analisis kebijakan tidak hanya sebatas menjalankan beberapa tahapan untuk mencapai tujuan akhir. Tujuan utama analisis kebijakan publik adalah menilai sejauh mana suatu kebijakan mencapai tujuannya (de Wee, *et al.*, 2024). Analisis kebijakan pun membantu merumuskan tujuan kebijakan bahkan berguna untuk membandingkan hasil yang diharapkan. Maka dari itu, selama proses pelaksanaannya, analisis kebijakan haruslah berfokus pada berbagai alternatif kebijakan yang dapat memberikan solusi baru. Hal tersebut dikarenakan kebijakan publik dirancang untuk menangani masalah saat ini dan di masa depan, sehingga analisis kebijakan juga berupaya memprediksi kebutuhan mendatang berdasarkan kondisi saat ini dan masa lalu.

Namun di lain sisi, hasil kebijakan bisa berbentuk hasil nyata maupun dampak yang lebih sulit diukur. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menentukan apakah suatu kebijakan benar-benar menyebabkan perubahan yang diinginkan. Jika tidak, maka kebijakan tersebut mungkin tidak diperlukan. Para analis kebijakan biasanya menggunakan model statistik berbasis teori untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan. Pada tahap akhir, dilakukan komparasi data untuk menentukan kebijakan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa depan (Pandey dan Shukla, 2022).

Konsep dan Proses Pembentukan Produk Unggulan Daerah (PUD)

PUD merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang berfokus pada identifikasi dan pengembangan komoditas atau produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat menjadi representasi dari potensi lokal suatu daerah (Hariyoko, 2021). Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pengembangan PUD tidak hanya memerlukan pengenalan produk-produk unggulan, tetapi juga analisis mendalam untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing produk tersebut di pasar lokal, nasional, dan internasional (Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, 2024). PUD didefinisikan sebagai produk atau komoditas yang dihasilkan dari daerah tertentu yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Produk ini biasanya terkait erat dengan budaya, sumber daya alam, dan keterampilan masyarakat setempat.

Meskipun teori dan konsep yang ada memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami pengembangan PUD, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Pertama, banyak teori yang cenderung bersifat deskriptif dan tidak memberikan panduan praktis yang cukup untuk implementasi. Misalnya, meskipun Dunn memberikan tahapan analisis kebijakan yang jelas, kurangnya fokus pada konteks lokal dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak relevan.

Kedua, banyak penelitian tentang PUD yang tidak mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan produk unggulan. Misalnya, perubahan dalam kebijakan perdagangan internasional, fluktuasi harga komoditas, dan perubahan preferensi konsumen dapat berdampak signifikan pada daya saing PUD. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan analisis yang lebih komprehensif yang mencakup faktor-faktor eksternal ini.

Ketiga, meskipun banyak penelitian yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan PUD, implementasi kebijakan sering kali tidak melibatkan masyarakat secara aktif. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan produk unggulan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan (Mansur, 2021).

Dasar Hukum Penyusunan PUD

Dasar hukum penyusunan PUD di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Peraturan BRIN No. 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Dalam Pasal 23,

disebutkan bahwa elemen keterpaduan riset dan inovasi di daerah meliputi:

- a. Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah.
- b. Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah.
- c. Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Pasal 29 menyatakan bahwa rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dijabarkan ke dalam rencana aksi riset dan inovasi di daerah. Rencana aksi ini harus memuat program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti serta program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah.

Metodologi Penentuan PUD

Dalam menentukan PUD, digunakan metode kualitatif untuk mengidentifikasi sektor dan subsektor pada PDRB yang diperoleh dari Bappeda Litbang Kota Surabaya. Adapun hasil identifikasi tersebut kemudian menjadi landasan dalam identifikasi masalah yang berkaitan dengan penentuan sektor-sektor perekonomian yang berpotensi untuk menjadi PUD dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil analisis kemudian digunakan sebagai acuan komparasi dengan kondisi lapangan di Kota Surabaya. Menggunakan analisis terhadap kontribusi PDRB sebagai metode alternatif dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang sektor-sektor yang benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Surabaya. Perhitungan ini melibatkan analisis langsung terhadap nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor.

Kriteria Umum PUD

Kriteria umum untuk menentukan PUD mencakup:

- 1) Mempunyai nilai produksi yang terbesar di daerah tersebut, artinya merupakan sektor basis.
- 2) Mempunyai serapan tenaga kerja yang besar, yang menunjukkan pelibatan masyarakat dalam komoditas tersebut.
- 3) Komoditas tersebut dapat diperbaharui dan berkelanjutan.
- 4) Mempunyai potensi untuk dikembangkan ke arah hilir dalam bentuk UMKM atau usaha baru untuk sektor turunan.
- 5) Memiliki potensi untuk terus bertumbuh, dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan sektor acuan.
- 6) Berpengaruh pada peningkatan indikator-indikator ekonomi dan sosial, seperti penyerapan tenaga kerja dan pengurangan angka kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif dengan fokus pada analisis literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen, yang mencakup berbagai sumber literatur seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen kebijakan terkait Produk Unggulan Daerah (PUD) (Pahleviannur, *et al.*, 2022). Penelitian ini berfokus pada pengembangan PUD di Indonesia, dengan perhatian khusus pada daerah-daerah yang memiliki potensi produk unggulan, seperti Kota Surabaya.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, teknik validasi yang digunakan meliputi triangulasi sumber, analisis kritis, dan referensi silang. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari literatur yang dianalisis. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses, faktor, dan dinamika yang memengaruhi pengembangan PUD sebagai strategi pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah (Rustam dan Subarkah, 2021).

.....

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Produk Unggulan Daerah (PUD) di Kota Surabaya merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Proses ini dilakukan di Bappeda Litbang Surabaya, di mana analisis menunjukkan bahwa penentuan PUD masih dalam tahap perhitungan kontribusi sub-sektor. Tiga sub-sektor yang dianalisis adalah sub-sektor industri makanan, sub-sektor perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor, serta sub-sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman.

Kerangka konseptual yang menghubungkan teori analisis kebijakan dengan pengembangan PUD dapat diketahui dengan mengidentifikasi masalah, penentuan tujuan kebijakan, penilaian alternatif kebijakan, evaluasi konsekuensi, dan implementasi dan evaluasi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kontribusi sub-sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya pada tahun 2023 menunjukkan hasil yang signifikan. Sub-sektor perdagangan besar memberikan kontribusi terbesar, diikuti oleh sub-sektor penyediaan akomodasi dan industri makanan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan sub-sektor ini dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan perekonomian lokal.

Untuk mengidentifikasi masalah dalam implementasi PUD, diperlukan analisis terhadap implementasi dan pengembangan PUD itu sendiri. Permasalahan pada penelitian ini terletak pada ketidaksesuaian antara fakta di lapangan dan hasil nilai pada metode perhitungan sektor unggulan dalam analisis potensi ekonomi di Kota Surabaya. Hasil perhitungan menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga perlu dilakukan pendekatan alternatif, yakni perhitungan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara garis besar, faktor yang mempengaruhi penentuan PUD di Kota Surabaya dapat dibagi menjadi dua kategori: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat mencakup potensi sumber daya alam, kapasitas produksi, dan keterlibatan masyarakat. Mengacu pada penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa nilai PDRB di Kota Surabaya tertinggi berada di sub-sektor perdagangan dan penyediaan akomodasi dan industri makanan. Kondisi ini terjadi mengingat karakteristik wilayah Kota Surabaya adalah perkotaan.

Pembangunan Kota Surabaya tidak hanya serta-merta terbatas dan berkulat pada satu poros, tetapi hingga perwujudan konsep *smart city* yang terimplementasi pada beberapa program digitalisasi dan aplikasi berbasis digital (Agustina, *et al.*, 2023). Kemudahan berbasis teknologi memudahkan baik masyarakat maupun pemerintah untuk memberikan pelayanan berbasis teknologi secara efektif dan efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, maka meningkatnya nilai PDRB pada kedua sub-sektor tersebut dikarenakan kapabilitas Kota Surabaya dalam mengembangkan konektivitas dalam bentuk digitalisasi dan pemanfaatan teknologi sehingga membuka peluang baru bagi perdagangan ataupun bisnis lokal.

Di Surabaya, sub-sektor industri makanan dan perdagangan besar menunjukkan nilai produksi yang signifikan dan menjadikannya sektor basis. Misalnya, industri makanan di Surabaya tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga memiliki potensi untuk diekspor, yang menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor basis. Selain itu, sub-sektor perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB yang menunjukkan bahwa sektor ini memiliki daya serap tenaga kerja yang besar. Keterlibatan masyarakat dalam sektor-sektor memiliki urgensi tersendiri, karena semakin banyak masyarakat yang terlibat, semakin besar pula dampak positif yang dapat dihasilkan, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Faktor eksternal, di sisi lain, mencakup dukungan kebijakan pemerintah, akses pasar, dan kondisi ekonomi makro. Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) serta promosi produk lokal menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing produk unggulan. Tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah, diketahui adanya kerangka kerja yang jelas bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan mengembangkan produk unggulan. Selain itu, akses pasar yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa produk unggulan dapat bersaing di pasar lokal dan internasional. Keterbatasan infrastruktur, seperti transportasi dan fasilitas pemasaran, menjadi tantangan yang signifikan yang perlu diatasi untuk mendukung pengembangan PUD.

Sebagaimana penjabaran faktor internal dan eksternal di atas, diketahui bahwa implementasi PUD dapat dimaksimalkan ketika adanya keselarasan antara kebijakan terencana, landasan hukum, implementasi, dan efektivitas lapangan. Permasalahan yang dialami adalah ketika pemerintah tidak dapat mewujudkan adanya keselarasan tersebut. Misalnya adalah keterbatasan aksesibilitas yang masih belum merata di seluruh wilayah di Kota Surabaya. Keterbatasan akses dapat beragam tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap fasilitas, tetapi juga akses terhadap informasi. Pun demikian dengan kondisi sumber daya manusia yang beragam sehingga berdampak pada optimalisasi kebijakan. Ketika masyarakat tidak dapat menerima sepenuhnya kebijakan yang direncanakan, maka secara berkelanjutan berdampak pada pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan secara konseptual masyarakat adalah objek pembangunan.

Berkaitan dengan masyarakat sebagai objek pembangunan, PUD disusun untuk mewujudkan pembangunan ekonomi lokal. Maka dari itu, selaras dengan kerangka konseptual yang dijabarkan oleh Dunn, menentukan PUD salah satunya adalah dengan mempertimbangkan tujuan kebijakan itu sendiri. Adapun untuk mencapai tujuan ini maka diperlukan adanya harmonisasi yang mencakup peningkatan daya saing produk, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. PUD dapat meningkatkan daya saing ekonomi lokal dengan memenuhi kriteria umum yang telah ditetapkan, serta harus mempunyai nilai produksi yang terbesar di daerah tersebut yang menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis. Sebagaimana diketahui, sub-sektor perdagangan besar dan industri makanan memenuhi kriteria ini dengan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB. Kedua sektor tersebut harus mampu menciptakan daya serap yang tinggi terhadap tenaga kerja. Maka dari itu, diperlukan optimalisasi pada masing-masing sub-sektor dengan memastikan adanya peran masyarakat di dalamnya sebagai tenaga kerja. Hal ini terlihat dari banyaknya tenaga kerja yang terlibat dalam industri makanan dan penyediaan akomodasi. Adapun representasi daya serap masyarakat sebagai tenaga kerja tidak hanya memberikan pendapatan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Identifikasi masalah dalam pengembangan PUD mencakup tantangan seperti akses pasar dan daya saing produk yang memerlukan pemahaman mendalam tentang kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal. Keseluruhannya pun tidak dapat terlepas dari karakteristik kewilayahan Kota Surabaya sebagai kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan terbentuk karena variasi pembangunan di berbagai sektor di Kota Surabaya yang disebabkan oleh fungsi administratif sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur (Putra dan Indrajati, 2021). Akibatnya tak hanya menjadi pusat aktivitas, Kota Surabaya pun cenderung akan mengalami kemudahan dalam pembangunan perekonomian lokal yang didukung oleh beragam mediator pembangunan ekonomi, seperti adanya pelabuhan pusat bongkar muat barang (Subekti dan Yasin, 2023). Potensi tersebut menjadikan Kota Surabaya mendukung terbukanya peluang pekerjaan, sehingga banyak masyarakat melakukan urbanisasi menuju Kota Surabaya untuk bekerja dan memutuskan untuk tinggal. Maka dari itu, penentuan tujuan kebijakan harus spesifik dan terukur, mencakup peningkatan daya saing produk, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, penilaian alternatif kebijakan menjadi penting untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan yang dapat diterapkan. Evaluasi konsekuensi dari setiap alternatif kebijakan harus mencakup dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan pengembangan PUD. Proses implementasi dan

.....

evaluasi yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, sangat penting untuk menciptakan rasa kepemilikan dan dukungan terhadap kebijakan yang diambil.

Sebagaimana kerangka konseptual pada teori analisis kebijakan oleh Dunn, diketahui bahwasannya diperlukan alternatif kebijakan yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan akhir dari suatu kebijakan, termasuk analisis terhadap kebijakan yang ada dan pengembangan kebijakan baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan menganalisis PDRB, pemangku kebijakan dapat lebih memahami sektor-sektor mana yang benar-benar berperan dalam perekonomian lokal dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Atau dapat dikatakan bahwa, komoditas yang ditentukan sebagai PUD harus dapat diperbaharui dan berkelanjutan sehingga dapat memenuhi kebutuhan lokal secara berkelanjutan.

Di Surabaya, produk-produk lokal seperti hasil pertanian dan perikanan dapat dikembangkan secara berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Mengingat Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang progresif terhadap teknologi dan konsep digitalisasi, pengembangan sektor pertanian dapat diintegrasikan dengan teknologi yang kemudian akan memudahkan *stakeholder* di dalamnya. Selaras dengan kondisi ini, PUD harus dilandasi oleh potensi yang kemudian dapat dikembangkan ke arah hilir dalam bentuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau usaha baru untuk sektor turunan. Misalnya, industri makanan dapat mendorong pengembangan UMKM yang memproduksi makanan olahan, yang akan meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, ketika kebijakan digitalisasi sektor basis tersebut tidak menunjukkan adanya tanda-tanda progresif, maka sektor PUD terpilih harus dapat diperbarui sebagaimana kondisi faktual di lapangan.

Ketika sudah teridentifikasi potensi dalam PUD, maka potensi tersebut dapat terus ditumbuhkan lebih tinggi dibandingkan sektor acuan. Di Surabaya, sub-sektor industri makanan dan penyediaan akomodasi menunjukkan tren pertumbuhan yang positif yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing daerah. Ketika sub-sektor yang menjadi basis dan potensi unggulan tidak lagi menunjukkan tanda-tanda yang progresif, maka dapat dilakukan penyesuaian kembali kebijakan berdasarkan nilai PDRB tertinggi. Terakhir, PUD harus berpengaruh pada peningkatan indikator-indikator ekonomi dan sosial, seperti penyerapan tenaga kerja dan pengurangan angka kemiskinan. Dengan mengembangkan PUD, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi di daerah tersebut.

Meskipun teori dan konsep yang ada memberikan kerangka kerja yang berguna, terdapat kelemahan yang perlu diperhatikan. Teori Dunn menjabarkan diperlukan adanya evaluasi konsekuensi, dan implementasi dan evaluasi. Dalam hal ini, proses evaluasi konsekuensi dapat dilakukan dengan melihat beberapa poin acuan seperti kurangnya panduan praktis untuk implementasi dan ketidakcukupan dalam mempertimbangkan faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan PUD. Sebagaimana tertuang dalam Permendagri No 9 tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD), komoditas yang dapat dijadikan PUD adalah berupa barang atau jasa yang dihasilkan di suatu wilayah tertentu, menjadi aset lokal dengan potensi ekonomi dan daya saing yang tinggi. PUD memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja di kawasan tersebut, diproduksi dengan memanfaatkan kearifan lokal, dan dapat diterima baik oleh pasar domestik maupun internasional. Dengan demikian, PUD dapat berperan dalam mendorong perkembangan ekonomi lokal di daerah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan analisis yang lebih komprehensif yang mencakup faktor-faktor eksternal dan memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan PUD. Dalam hal ini masyarakat sebagai objek pembangunan dapat menjadi landasan untuk mengevaluasi terhadap konsekuensi dan implementasi agar setelahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Dasar hukum penyusunan PUD di Indonesia, seperti yang diatur dalam Peraturan BRIN

No. 5 Tahun 2023, memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengembangan produk unggulan daerah. Metodologi yang digunakan dalam penentuan PUD, seperti Location Quotient (LQ), Shift Share, dan Tipologi Klassen, membantu dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Secara keseluruhan, penentuan PUD di Kota Surabaya sebagai strategi pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah menunjukkan hasil yang menjanjikan. Dengan mengidentifikasi dan mengembangkan produk unggulan yang sesuai dengan potensi lokal, Kota Surabaya dapat meningkatkan daya saingnya dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Temuan dari analisis ini menunjukkan bahwa pengembangan PUD di Kota Surabaya tidak hanya bergantung pada potensi sumber daya alam, tetapi juga pada dukungan kebijakan dan partisipasi masyarakat. Kontribusi sub-sektor terhadap PDRB menunjukkan bahwa sektor-sektor ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi lokal. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengembangan PUD sangat penting untuk keberlanjutan produk unggulan. Ketika masyarakat merasa terlibat dalam proses, mereka cenderung lebih percaya pada hasil yang diumumkan dan mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengembangan produk unggulan memerlukan pendekatan yang holistik dan partisipatif. Penelitian oleh Adiyatin et al. (2019) menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan. Selain itu, penelitian oleh Hariono et al. (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan PUD di daerah tertentu sangat dipengaruhi oleh dukungan kebijakan dan infrastruktur yang memadai. Diskusi ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pengembangan PUD, tantangan seperti akses pasar dan keterbatasan infrastruktur masih perlu diatasi.

Penelitian oleh Winarno et al. (2022) juga mencatat bahwa pengembangan produk unggulan harus mempertimbangkan dinamika pasar dan kebutuhan konsumen yang terus berubah. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku usaha perlu berdinamika untuk terus melakukan riset pasar dan beradaptasi dengan tren yang ada. Berdasarkan teori analisis kebijakan William Dunn sebagai acuan penelitian ini, diketahui bahwa analisis yang telah dilakukan menunjukkan pengembangan PUD memerlukan pendekatan yang sistematis dan terencana sebagaimana tercantum pada kerangka konseptual. Identifikasi masalah, penentuan tujuan, penilaian alternatif, dan evaluasi konsekuensi adalah langkah-langkah penting yang harus diambil untuk memastikan keberhasilan pengembangan produk unggulan.

Implikasi teoretis dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan PUD harus dipahami sebagai proses yang melibatkan berbagai aktor dan faktor. Teori analisis kebijakan dapat digunakan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam pengembangan PUD, dengan mempertimbangkan konteks lokal dan partisipasi masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan dukungan terhadap pelaku usaha di sub-sektor yang telah diidentifikasi, seperti memberikan pelatihan dan akses ke modal. Selain itu, promosi produk lokal harus ditingkatkan untuk memperluas pasar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan PUD. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam memanfaatkan potensi lokal di Indonesia, serta memberikan wawasan tentang bagaimana PUD dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan wilayah.

KESIMPULAN

Analisis penentuan Produk Unggulan Daerah (PUD) di Kota Surabaya menunjukkan bahwa sub-sektor industri makanan, perdagangan besar, dan penyediaan akomodasi memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya. maka dari itu, penentuan PUD dapat diturunkan dari masing-masing sub-sektor tertinggi pada PDRB. Penentuan PUD dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti potensi sumber daya alam, kapasitas produksi, dukungan kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat. PUD berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat struktur ekonomi daerah. Hasil analisis menunjukkan ragam potensi daerah Kota Surabaya dapat terus berkembang secara fluktuatif mengingat Kota Surabaya adalah kawasan pusat aktivitas masyarakat sehingga daya serap terhadap tenaga kerja cenderung tinggi dan nantinya akan memudahkan pengembangan ekonomi lokal. Dengan memahami dan mengembangkan PUD, suatu wilayah dapat lebih kompetitif di pasar regional maupun global sambil tetap menjaga keberlanjutan sumber daya. Selain itu, PUD juga mencerminkan identitas lokal melalui budaya, tradisi, dan sumber daya alam, sehingga pengembangannya tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan budaya dengan meninjau kebutuhan masyarakat lokal.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam mengenai pengembangan kebijakan produk unggulan daerah (PUD) yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi kebijakan yang telah ada dan merumuskan perbaikan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat serta efektivitas pengembangan PUD. Di sisi lain, penelitian yang mengeksplorasi dampak sosial dan ekonomi dari pengembangan PUD juga penting untuk mengidentifikasi kontribusinya dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja baru. Terakhir, studi perbandingan antara daerah yang berhasil mengembangkan PUD dengan daerah yang belum dapat memberikan wawasan berharga mengenai faktor-faktor keberhasilan serta membantu merumuskan rekomendasi bagi daerah yang masih dalam tahap awal pengembangan.

DAFTAR REFERENSI

- Adiyatin, D., Satyahadewi, N., & Perdana, H. (2019). Analisis Overlay Untuk Menentukan Potensi Sektor Ekonomi Unggulan Dalam Pembangunan Daerah (Studi Kasus Dengan PDRB Kota Pontianak). *Bimaster: Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya*, 8(4).
- Berita Negara Republik Indonesia No. 116, 2014. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Budiyanto, H. (2023). Analisis Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Kendal. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(1), 01-15.
- de Wee, G., Asmah-Andoh, K., & Jakoet-Salie, A. (2024). A Systems-Theoretical Exploration for Understanding and Enhancing Policy Design: Expanding an Analytical Locus With Implications for Policy Studies. *Systems Research and Behavioral Science*. 1-14. <https://doi.org/10.1002/sres.3044>
- Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah. (2024). *Penentuan Produk Unggulan Daerah Kota Surabaya*. Jakarta.
- Dunn, W. N. (2014). *Public Policy Analysis*. Pearson.
- Hariono, B (2024). "Regional Superior Products as The Key to Sustainable Food Security in Jember Regency, Indonesia." *International Journal of Technology, Food and Agriculture*.
- Hariyoko, Y. (2021). Analisa Pengembangan Ekonomi Lokal Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 16(2), 197-206.
- Kim, Y. J., & Park, J. (2019). A sustainable development strategy for the Uzbekistan textile

- industry: The results of a SWOT-AHP analysis. *Sustainability*.
- Madjid, C. N. I. F., Firdaus, J., Winarno, A., & Hermawan, A. (2022). Pengembangan Produk Unggulan Badan Usaha Milik Desa Berbasis E-Marketing. *Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks*, 10(2), 123-133.
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324-334.
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., ... & Sinthania, D. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. Pradina Pustaka.
- Pandey, A., & Shukla, S. P. (2022). Analysis of Concepts Affecting the Public Policies. *Mid. East J. Appl. Sci. & Tech*, 5(2), 27-38.
- Peraturan BRIN No. 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah.
- Pratiwi, M. C. Y. (2024). Identifikasi Dan Penentuan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 8(2), 106-128.
- Putra, R. D. W., & Indradjati, R. P. N. (2021). Studi Deskriptif–Evaluatif Bentuk Tipologi Kawasan (Pembelajaran Dari Kota Surabaya). *Jurnal Pengembangan Kota*, 9(2), 124-142.
- Rustam, K., & Subarkah, R. (2021). Studi Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Bogor Berbasis Produk Unggulan Daerah Dengan Analisis SWOT. *Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 16(2).
- Setiajatnika, E., & Astuti, Y. D. (2022). Potensi Produk Unggulan Daerah dan Strategi Pengembangannya di Kabupaten Kepulauan Aru.
- Subekti, Y., & Yasin, M. (2023). Analisis PDRB Kota Surabaya Tahun 2020-2023 Sebagai Cerminan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surabaya. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*, 2(2), 124-130.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
-